

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(RLPPD)

KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, maka Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) disusun dalam rangka memenuhi amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 merupakan ringkasan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 1 (satu) tahun anggaran yang dipublikasikan ke masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas yang memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19). Situasi masyarakat dan negara mengalami perubahan dari akibat yang ditimbulkan bencana non alam Covid 19. Dampak pandemi ini tentunya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk pemerintah daerah. Target sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah berdampak dengan dilakukannya penyesuaian program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah. Belanja daerah diarahkan pada percepatan penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Akan tetapi kondisi ini tidak

menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi segala kewajiban yang diamanahkan.

Kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2020 merupakan hasil kerja bersama dari seluruh stakeholder yakni pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta (private sector). Keterlibatan berbagai pihak memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah karena tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah sehingga perlu partisipasi masyarakat dan keterlibatan pihak swasta. Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya atas dukungan dan kerjasama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Perempuan, Pimpinan Partai Politik, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang telah bersama dan berupaya mendukung program pemerintah daerah serta menciptakan situasi kondusif.

Kami mengharapkan segala bentuk masukan, kritik membangun dan saran yang bersifat solutif demi perbaikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang di masa yang akan datang. Dengan memohon ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kiranya senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam melanjutkan cita-cita masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lubuk Pakam, **31 Mei** 2021

BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal digunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator). Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan	75.42	75 44	0.010/
	Manusia	75,43	75,44	0,01%
2	Angka Kemiskinan	3,89	3,88	-0,25%
3	Angka Pengangguran	5,74	9,50	65,50%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,18	-1,78	-134,3%
5	Pendapatan Per Kapita*	49,794 juta	49,296 juta	-1%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,273	0,312	14,28%
	(Gini Ratio)*	0,213	0,012	1 1,2070

Sumber data: BPS Kab. Deli Serdang, 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Indikator IPM terdiri atas Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Deli Serdang mencapai angka 75,43 pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,51 dari angka 74,92 pada tahun 2018. Pada tahun 2020 angka Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan data BPS terhitung Februari 2021 yaitu 75,44 meningkat sebesar 0,01 dari angka 75,43 pada tahun 2019. Capaian IPM Kabupaten Deli Serdang telah semakin membaik dan sudah dalam status IPM yang tinggi (di atas 70).

Angka Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dengan melihat persentase tingkat kemiskinan suatu daerah. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian,

kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acap kali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan merupakan pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kurangnya air bersih, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terhitung Februari 2021, angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,88% pada tahun 2020, angka ini turun dari 3,89% pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020.

Angka Pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka, mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran (tidak bekerja). Kita ketahui bersama bahwa sejak awal Maret 2020 hingga saat ini hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang terjangkit penyebaran pandemi Novel Corona virus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia, termasuk halnya Kabupaten Deli Serdang juga cukup besar dan dirasakan di berbagai lini/sektor kehidupan seperti ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 berada di posisi 5,74% dan angka ini naik menjadi 9,5% pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi juga berdampak mengalami penurunan dari 5,18 % pada tahun 2019 menjadi -1,78% pada tahun 2020. Demikian juga dengan Angka Pendapatan Per Kapita yang diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurun 1% dari 49,794 juta pada tahun 2019 menjadi 49,296 juta pada tahun 2020. Sedangkan angka gini rasio juga mengalami peningkatan yakni dari 0,273 pada tahun 2019 menjadi 0,312 untuk tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin naik.

II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Tantangan yang dihadapi pada tahun 2020 adalah adanya pandemi Covid 19, yang menuntut pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang lebih mengedepankan penangangan Covid 19 dan pada kesehatan masyarakat dan di lain sisi pemerintah daerah dituntut pada pencapaian target kinerja daerah. Hal ini berdampak pada capaian pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengalami *refocussing* dan realokasi anggaran.

Capaian pelaksanaan kinerja urusan pelayanan dasar Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 ini memuat capaian kinerja kunci hasil (*outcome*) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	75,72	Dinas Pendidikan
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,66	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,63	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	78,48	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,14	Dinas Kesehatan
		2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	65,22	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,92	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,41	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,00	
		6	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	86,38	

No.	Urusan Pemerintahan	No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,43	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83,36	
		10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,86 86,69	
		11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,43	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	77,62	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	33,83	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	38,81	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai	Bukan Kewenangan Kabupaten melainkan kewenangan	PUPR
		2	kewenangan kabupaten Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten	BWSS Bukan Kewenangan Kabupaten melainkan kewenangan BWSS	PUPR
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenagan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	75,80	PUPR
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	85,26	PKP

No.	Urusan Pemerintahan	No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		5 6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic Rasio kepatuhan IMB	100	PKP DPMPTSP
			Kabupaten		
		7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	72,14	PUPR
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	19,62	PUPR
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Tidak Terdapat kecelakaan konstruksi PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	0	PKP
	Permukiman	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	0	PKP
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	3,90	PKP
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,71	PKP
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	66,04	PKP
		6	Rumah layak huni	99,29	PKP
5	Ketentraman, Ketertiban	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	96,84	Satpol PP
	Umum dan Perlindungan	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP
	Masyarakat	3	Jumlah warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	1.748.481	BPBD
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.934	BPBD
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5344	BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	67,37	Satpol PP
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	Satpol PP
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	89,04	Dinas Sosial
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	Dinas Sosial

III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintah daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah memberikan penghargaan berdasarkan hasil EPPD melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dari hasil penetapan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh Pemerintah Daerah, Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan hasil kinerja yang meningkat. Keputusan Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Kabupaten Deli Serdang dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan masing-masing skor 3,0189 untuk LPPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 dan skor 3,0515 untuk LPPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Sedangkan untuk status kinerja terhadap LPPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 belum ada Keputusan Menteri Dalam Negeri

B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Deli Serdang selama 3 (tiga) kali berturut-turut sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 merupakan pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pencapaian ini harus terus

dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

IV. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah, yaitu memperbaiki kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efisien serta upaya untuk menyelaraskan kapabilitas Pemerintah Daerah dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Agar penyelerasan pemerintahan terlaksana dengan efisien dan efektif serta mencegah tumpang tindih dalam pendanaan, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diawali dengan proses Musrenbangda dan hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya digunakan sebagai dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Deli Serdang dan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintah yang menugaskan. Untuk lebih jelasnya, realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN – LRA	3.620.159.870.638,00	3.335.349.826.580,82	92,13	3.573.056.389.618,75
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	1.100.498.262.974,00	809.719.829.264,82	73,58	825.375.281.296,75
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	881.671.250.000,00	596.316.675.898,77	67,63	652.563.113.786,79
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	71.784.705.250,00	47.643.621.168,00	66,37	34.182.703.026,25
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	30.780.000.000,00	16.190.194.281,00	52,60	22.017.441.824,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	116.262.307.724,00	149.569.337.917,05	128,65	116.612.022.659,71
1.2	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	2.036.934.438.664,00	2.049.562.028.316,00	100,62	2.279.470.240.722,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.845.298.432.000,00	1.837.294.622.988,00	99,57	2.000.833.953.938,00
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak – LRA	53.210.805.000,00	58.059.983.669,00	109,11	52.300.753.409,00
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.767.115.000,00	3.172.723.400,00	114,66	3.908.912.104,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	1.385.860.252.000,00	1.376.847.320.000,00	99,35	1.513.584.154.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	403.460.260.000,00	399.214.595.919,00	98,95	431.040.134.425,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	46.840.400.000,00	57.246.737.000,00	122,22	0,00
1.2.2.3	Dana Penyesuaian – LRA	46.840.400.000,00	57.246.737.000,00	122,22	0,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	144.795.606.664,00	155.020.668.328,00	107,06	278.636.286.784,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	144.795.606.664,00	155.020.668.328,00	107,06	278.636.286.784,00

RLPPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	482.727.169.000,00	476.067.969.000,00	98,62	468.210.867.600,00
1.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	174.556.500.000,00	167.897.300.000,00	96,19	161.823.960.000,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya – LRA	308.170.669.000,00	308.170.669.000,00	100,00	306.386.907.600,00
2	BELANJA	3.190.043.526.723,12	2.770.409.994.709,19	86,85	3.086.110.287.501,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.446.188.435.760,08	2.223.407.524.744,00	90,89	2.376.006.626.520,50
2.1.1	Belanja Pegawai	1.432.839.273.554,00	1.351.706.896.984,00	94,34	1.426.203.584.060,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	979.867.181.206,08	842.395.196.760,00	85,97	926.112.632.460,50
2.1.3	Belanja Hibah	33.481.981.000,00	29.305.431.000,00	87,53	23.690.410.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	450.536.065.700,00	449.506.665.700,00	99,77	515.297.082.375,00
2.2	BELANJA MODAL	610.855.090.963,04	480.305.325.651,90	78,63	703.280.070.640,29
2.2.1	Belanja Modal Tanah	12.854.840.000,00	4.097.808.500,00	31,88	17.972.661.400,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.636.785.121,04	113.183.905.976,10	84,70	112.483.290.455,46
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.138.369.674,00	79.696.317.647,80	71,71	131.336.367.981,83
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	330.549.282.271,00	261.801.437.621,00	79,20	417.973.501.999,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.675.813.897,00	21.525.855.907,00	94,93	23.514.248.804,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	133.000.000.000,00	66.697.144.313,29	50,15	6.823.590.340,21
2.3.1	Belanja Tak Terduga	133.000.000.000,00	66.697.144.313,29	50,15	6.823.590.340,21
2.4	TRANSFER	509.144.334.626,00	503.751.226.013,00	98,94	515.297.082.375,00
2.4. 1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	58.608.268.926,00	54.244.560.313,00	92,55	0,00

RLPPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
2.4.2	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	58.608.268.926,00	54.244.560.313,00	92,55	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.027.990.711,12)	61.188.605.858,63	(77,43)	(28.350.980.257,25)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.357.990.711,12	83.358.990.711,39	100,00	123.208.970.968,37
3.1.1	Penggunaan SiLPA	83.357.990.711,12	83.357.990.711,39	100,00	123.179.250.968,37
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	0,00	1.000.000,00	0,00	29.720.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.330.000.000,00	4.330.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.330.000.000,00	4.330.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	79.027.990.711,12	79.028.990.711,39	100,00	111.708.970.968,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)	140.217.596.560,42	0,00	83.357.990.711,12

Sumber data: LRA Unaudited BPKA per tanggal 16 Maret 2021

RLPPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020

V. INOVASI DAERAH

Dalam perkembangan era globalisasi ini sangat banyak kemajuan baik dari teknologi informasi serta komunikasi yang memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Setiap daerah memiliki cara masing - masing dalam mengembangkan daerahnya sehingga terciptalah inovasi daerah yang merupakan cara suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inovasi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Dalam Pemerintahan Daerah bahwa rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi". Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah bahwa "sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : Peningkatan Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing Daerah. Dalam Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2021 tentang Inovasi Daerah telah dijelaskan mengenai inovasi daerah yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2020 Kabupaten Deli Serdang memiliki sebanyak 49 inovasi daerah yang masuk dalam daftar Innovative Government Award (IGA) tahun 2020.

Adapun daftar inovasi Kabupaten Deli Serdang pada *Innovative* Government Award yaitu:

No.	Inovasi Daerah
1.	Program Cerdas, Opung Sari Basah Bang, MesRA BerTUAH mewujudkan
	DESA SATU (Deli Serdang Sekolah Bermutu)
2.	INOVASI DAERAH NEW NORMAL PENCEGAHAN COVID-19 PADA SEKTOR
	RESTORAN
3.	Inovasi Daerah New Normal HORE Covid GO Pencegahan Covid-19 Pada
	Sektor Perhotelan
4.	INOVASI DAERAH NEW NORMAL DISPORABUDPAR KAB.DELI SERDANG
	2020 SEKTOR TEMPAT WISATA
5.	KENANG LEMU (KENali deli serdANG LEwat MUseum)
6.	PAPA BUKAN MAMA (Program Pemberdayaan Budidaya Perikanan untuk
	Mewujudkan Mayarakat Mandiri)
7.	SITANGAN PATEN (Sistem Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
8.	Ragita Untuk Sehati
9.	INOVASI DAERAH NEW NORMAL SEKTOR PASAR TRADISIONAL KAB. DELI
	SERDANG 2020
10.	INOVASI DAERAH NEW NORMAL KAB. DELI SERDANG 2020 SEKTOR
	PASAR MODEREN
11.	Sadoku (Siap Antar Dokumen Kependudukan)
12.	Klinik Wirausaha Deli Serdang
13.	INOVASI DAERAH NEW NORMAL DISHUB KAB. DELI SERDANG 2020
	SEKTOR TRANSPORTASI UMUM

No.	Inovasi Daerah
14.	Inovasi Daerah New Normal DPMPPTSP Kab. Deli Serdang 2020 Sektor PTSP
	(Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
15.	PERAK KENCANA JALACINTA (Pelayanan Bergerak Keluarga Berencana
	Menjangkau Wilayah Terpencil dan Perbatasan)
16.	INOVASI DAERAH NEW NORMAL SEKTOR PASAR TRADISIONAL KAB. DELI
	SERDANG 2020
17.	Pengembangan Fungsi Supervisi Akademik di Dalam Kelas
18.	POSROA (POLISI ROKOK ASAP)
19.	GENIT (Gerakan Nikah Sehat)
20.	KINCIR AIR DI DESA CIMAHE KECAMATAN BANGUN PURBA
21.	SEDULOR
22.	SI CASING SERASI (E-Cascading, E-Planning,E-Sakip Terintegrasi)
23.	TRANSFORMASI PERFORMANCE SMP NEGERI 1 PATUMBAK MELALUI
	STRATEGI 3M PLUS PPK UNTUK MEWUJUDKAN DREAM SCHOOL
24.	GERAKAN SILINGKAR BIRU MEWUJUDKAN SEKOLAH BERKARAKTER
	RENAMANTORIN
25.	UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PENGELOLAAN
	PENILAIAN MELALUI PELATIHAN MICROSOFT OFFICE EXCEL DI SD
	BINAAN
26.	SITAKOLABOS CEPAK MAS MesRA BerTUAH
27.	Vlog Eksperiental Learning Teknik Fermentasi
28.	UPAYA PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENGEMBANGAKAN PROGRAM UDAYA
	LITERASI INFORMASI SMP NEGERI 1 LABUHAN DELI BEKERJASAMA
	DENGAN ORTUSIS
29.	Inovasi Pustakawan Akademik Menumbuhkan Minat Baca Siswa Melalui
	Babu Pelit MPR
30.	PEMBELAJARAN PAI BERBASIS INQUIRI DI SMP NEGERI 1 PATUMBAK
	KABUPATEN DELI SERDANG
31.	SATU KOMPETINSI UNTUK PEMBELAJARAN, SATU E-BOOK
32.	MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN
	MODEL KOOPERATIF TIPE JIGSAW
33.	RISADILA JUDES DI SMP NEGERI 1 PATUMBAK
34.	APLIIKASI CYPORECTOR MENCIPTAKAN AKUR MEMVIDEORAN
35.	Mengatasi Kesulitan Siswa Menulis Teks Bahasa Inggris Melalui Permainan
	"PACTOR"
36.	Permainan Karindi
37.	BAPER BAGI KALIAN
38.	BAKKSHOKU DI SMP PAB 5 PATUMBAK PEMANFAATAN LOMBA
	PRAKTIKUM IPA UNTUK MENINGKATKAN PEMAKAIAN LABORATORIUM
	SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN IPA DI SMP NEGERI 1 PATUMBAK

No.	Inovasi Daerah
	TAHUN 2019
39.	PENDEKATAN KONSELING ISAMI MELALUI SENTUHAN SUFI UNTUK
	MEMBANTU MASALAH PSIKIS SISWA KELAS IX SMP NEGERI 2 LUBUK
	PAKAM TAHUN 2018 (KISMISS)
40.	Cermin Pelepah Sawit
41.	PEMANFAATAN BAHAN BEKAS UNTUK ALAT PETAGA MODEL OTOT DAN
	SENDI PADA SISTEM GERAK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
	SISWA KELAS VIII T.P 2018-2019 DI SMP NEGERI 1 PATUMBAK
42.	PEMANFATAAN LOMBA PRAKTIKUM IPA UNTUK MENINGKATKAN
	PEMAKAIAN LABORATORIUM SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN IPA DI
	SMP NEGERI 1 PATUMBAK TAHUN 2019
43.	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAMES TOURNAMENT
	MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN POWER POINT INTERAKTIF
44.	OPTIMALISASI PERAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
	MELALUI SRATEGI SPIMEP
45.	PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PENGGUNAAN
	ALAT PERAGA
46.	MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DENGAN MEDA KARTU
	DOMINO BILANGAN BULAT (KADO BILBUL) DALAM PEMBELAJARAN
	MATEMATIKA DI KELAS VII-8 SMP NEGERI 1 TANJUNG MORAWA
47.	MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DENGAN MEDIA KARTU
	DOMINO BILANGAN BULAT (KADO BILBUL) DALAM PEMBELAJARAN
	MATEMATIKA DI KELAS VII-8 SMP NEGERI 1 TANJUNG MORAWA
48.	PRAKTIK INOVASI PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA PADA MATERI
	TEKANAN ZAT DENGAN METODE PROBEX PADA SISWA KELAS VIII-1
	SMPN 1 LABUHAN DELI
49.	PENGGUNAAN PERMAINAN SEBAGAI BAGIAN DARI PLAY TERAPI BAGI
	SISWA YANG TERLAMBAT DATANG DI SMP NEGERI 1 PATUMBAK

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat, dengan diraihnya penghargaan TOP 45 inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan RB) yakni Inovasi DESA SATU (Deli Serdang Sekolah Bermutu) pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020 di Jakarta. Penghargaan Nasional bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh menteri MENPAN RB Tjahjo Kumolo disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly dan pejabat kementerian lainnya. Penganugerahan Apresiasi Top 45 DESA SATU (Deli Serdang Sekolah Bermutu) yang diperoleh melalui kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2020 yang disebut Top 45 ini merupakan ajang tertinggi dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN-RB

atas pengakuan praktek inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Program tersebut merupakan Kolaborasi atau gabungan dari tiga inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui dinas Pendidikan. Pertama konsep CERDAS (Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi Terhadap Sekolah) dimulai pada tahun 2005 dan pernah mendapatkan penghargaan TOP 99 dari KEMENPAN-RB pada tahun 2016, selanjutnya Konsep OPUNG SARI BASAH BANG (Operasi Pungut Sampah Setiap Hari, Bank Sampah Sekolah dan Pembinaan Berjenjang) dimulai pada tahun 2014 juga mendapatkan penghargaan TOP 99 dari KemenPAN RB tahun 2017 dan MeSRA BerTUAH (Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Bersama Orang Tua, Masyarakat dan Sekolah) pada tahun 2016.

VI. PENUTUP

Pada tahun 2020 terjadi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19), situasi masyarakat dan Negara mengalami perubahan dari akibat yang ditimbulkan bencana non alam Covid 19. Dampak pandemi ini tentunya mempengaruhi target sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah yang menuntut penyesuaian program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah. Belanja daerah diarahkan pada percepatan penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Namun kondisi ini tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi segala kewajiban yang diamanahkan.

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana amanat Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat sebagai media untuk menginformasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami menyadari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2020 masih terdapat berbagai kekurangan untuk menyahuti aspirasi masyarakat namun dengan pengabdian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan dukungan berbagai pihak terus berupaya mewujudkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami perbuat sebagai salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada Pemerintah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua.